

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Ciri dan karakter utama pada demokrasi modern adalah sistem perwakilan melalui lembaga perwakilan rakyat. Sistem ini diperlukan berhubung rakyat tidak ikut secara langsung menentukan jalannya pemerintahan, tetapi melalui wakil-wakilnya dalam lembaga perwakilan rakyat. Wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat itu merupakan suatu kelompok kecil yang berasal dari rakyat dengan kapasitas serta kualitas yang ada pada wakil rakyat tersebut, berbicara dan bertindak untuk kepentingan rakyat yang mereka wakil¹.

Pemilu 2004 berbeda dengan sebelumnya, pemilu sekarang selain memilih partai politik juga sekaligus memilih calon legislatifnya (wakil rakyat) yang sesuai dengan aspirasi para pemilihnya. Hal ini secara tidak langsung dapat melihat kualitas calon yang diajukan oleh partai untuk duduk di lembaga perwakilan rakyat. Sesuai tertuang didalam undang-undang RI nomor 12 tahun 2003 yaitu pasal 65 ayat 1 yang berbunyi: "setiap partai politik peserta pemilu dapat mengajukan calon anggota DPR, DPRD propinsi, dan DPRD kabupaten/kota untuk setiap daerah pemilihan dengan memperhatikan keterwakilan perempuan sekurang-kurangnya 30%².

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan) keluar sebagai pemenang pemilu legislatif 2004 dengan meraih kursi terbanyak, yakni 15 kursi

¹ H.A. Kartiwa, *Artikel Pemilu Menentukan Kualitas Wakil Rakyat*, 15 April 2004.

DPRD Yogyakarta. Hal ini sangat menggembirakan seluruh elemen masyarakat pendukungnya dan para pengurus DPD-PDIP.

TABEL 1.1
PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK³

NOMOR DAN NAMA PARPOL PESERTA PEMILU	DPR	DPRD PROVINSI				
		YOGYA-KARTA	BANTUL	K. PROGO	SLEMAN	G. KIDUL
1. Partai Nasional Indonesia Marhaenisme	15,128	824	1,207	4,311	3,281	3,987
2. Partai Buruh Sosial Demokrat	7,011	0	0	784	0	2,494
3. Partai Bulan Bintang	34,942	3,157	5,309	3,382	4,778	13,991
4. Partai Merdeka	12,817	612	1,217	433	1,094	10,576
5. Partai Persatuan Pembangunan	94,268	11,454	16,843	12,146	26,729	12,191
6. Partai Persatuan Demokrasi Kebangsaan	10,015	411	897	4,350	704	2,690
7. Partai Perhimpunan Indonesia Baru	3,011	337	431	335	506	810
8. Partai Nasional Benteng Kemerdekaan	13,453	774	2,479	1,786	1,821	3,201
9. Partai Demokrat	108,544	20,991	13,725	10,841	26,774	11,590
10. Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia	10,072	684	1,589	1,948	2,342	2,213
11. Partai Penegak Demokrasi Indonesia	10,571	612	1,537	0	1,212	2,820
12. Partai Persatuan Nahdlatul Ummah Ind	13,122	1,089	2,674	1,886	2,197	1,689
13. Partai amanat Nasional	342,921	52,848	80,218	39,197	99,216	56,761
14. Partai Karya Peduli Bangsa	67,415	2,537	19,311	8,021	14,562	16,350
15. Partai Kebangkitan Bangsa	193,478	6,539	54,655	30,319	60,121	31,463
16. Partai Keadilan Sejahtera	141,114	24,990	32,362	16,372	47,644	16,802
17. Partai Bintang Reformasi	14,001	892	3,715	943	3,661	3,136
18. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	503,321	59,758	151,336	49,840	104,288	99,839
19. Partai Damai Sejahtera	32,038	11,008	5,244	2,183	11,135	3,157
20. Partai Golongan Karya	266,444	23,804	37,098	34,091	50,610	99,563
21. Partai Patriot Pancasila	7,384	412	1,666	2,822	1,279	1,917
22. Partai Sarikat Indonesia	6,665	300	2,002	2,219	1,729	1,524
23. Partai Persatuan Daerah	12,474	805	3,503	1,368	4,201	1,640
24. Partai Pelopor	4,438	399	969	236	1,175	1,508
TOTAL SUARA	1,924,647	225,237	439,987	229,813	471,059	401,912
JUMLAH KURSI	8	7	14	6	16	12
BPP SEMENTARA	240,581	32,177	31,428	38,302	29,441	33,493

Komisi Pemilihan Umum DJI YOGYAKARTA

TABEL 1.2
DATA ANGGOTA DPRD PROPINSI DIY⁴
HASIL PEMILU TANGGAL 5 APRIL 2004

Partai Politik	Nama Calon Legislatif	Daerah Pemilihan
PDI PERJUANGAN	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tatang Setiawan S.H 2. Henricus Wiseno Hari Rahardjo 3. Mualliban, S.Pd 4. Nuryadi 5. R. Eko Handriyanto, S.Sos 6. Jusuf Kresnadi, S.Sos 7. H. Nasrullah Krisnam 8. H. Umar Sriyanto 9. H. Djuwanto 10. R. Suprpto 11. Esti Wijayati 12. Nicolaus Langgeng Suksmanto, S.Pd 13. Supriyono, S.IP 14. Ternalem PA, S.IP 15. Drs. Endro Subektyo 	Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kab Bantul Kab Bantul Kab Bantul Kab Bantul Kab Bantul Kab Kulonprogo Kab Sleman Kab Sleman Kab Sleman Kab Sleman Kab Gunungkidul Kab Gunungkidul Kab Gunungkidul
PARTAI AMANAT NASIONAL	<ol style="list-style-type: none"> 1. Nazaruddin, S.H 2. Muhammad Afnan Hadikusumo 3. Takdir Ali Mukti, S.Sos 4. Isti'anah ZA, S.H., M.Hum 5. Drs. H. Sudaryono 6. Drs. Immawan Wahyudi, M.Hum 7. Ir. Sudrajat Selorudjito 8. Drs. H. Basuki Rakhmad 9. Imam Sujangi, S.Si, Apt 10. Hj. Tutiek Masria Widyo, S.E 11. H.M. Yasir, S.Sos 	Kota Yogyakarta Kota Yogyakarta Kab Bantul Kab Bantul Kab Bantul Kab Kulonprogo Kab Sleman Kab Sleman Kab aSleman Kab Gunungkidul Kab Gunungkidul
PARTAI GOLKAR	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ir. Eddi yanto Abdullah 2. Erwin Nizar 3. Deddy Suwandi SR, S.H 4. H. Khairuddin 5. George Bungaran L. Panggabean 6. Drs. Gandung Pardiman, MM 7. R.H. Heru W, S.Sos, M.Si 8. Drs. Stefanus Mulyadi 	Kota Yogyakarta Kab Bantul Kab Kulonprogo Kab Sleman Kab Sleman Kab Gunungkidul Kab Gunungkidul Kab Gunungkidul
PARTAI KEBANGKITAN BANGSA	<ol style="list-style-type: none"> 1. H. Abdul Halim Muslih 2. H. Ida Fatimah ZA 3. Drs. H. Noor Harish 4. H. Sukanto, S.H 5. Drs. H. Nur Achmad Affandi, M.B.A 6. Agus Sulistiyono 	Kab Bantul Kab Bantul Kab Kulonprogo Kab Sleman Kab Sleman Kab Gunungkidul
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drs. Basuki AR, M.Si 2. Arif Rahman Hakim 3. Tri Harjono, S.T., M.T 4. H. Cholid Mahmud, S.T., M.T 	Kota Yogyakarta Kab Bantul Kab Kulonprogo Kab Sleman

menjaga moral. “lima hal itulah yang disampaikan Megawati sebagai kata kunci caleg PDI Perjuangan untuk turun ke bawah”.⁵

Banyak sekali dalam rekrutmen calon legislatif dari PDI Perjuangan berangkat dari aktivis partai politik, dilihat dari sudut pandang mengenai latar belakang PDI pada masa Soerjadi dan petinggi-petinggi PDI lainnya yang saling bermain dan saling sikut mengikut dalam perebutan kekuasaan. Sejarah pada masa Orde Baru (ORBA) telah tertulis bahwa PDI yang dipimpin oleh Soerjadi mendapat dukungan dari pemerintah yang dapat dikendalikan atau menggiring langkah PDI dalam menjalankan program partai untuk berkecimpung kedalam sistem politik di Indonesia. Sedangkan kubu Megawati mendapat tekanan dari pemerintah maupun petinggi-petinggi PDI dari kubu Soerjadi. Tantangan yang dihadapi oleh Megawati sangat berat sehingga perjuangan yang dilakukan menuai hasil dengan memperoleh simpatik dari arus bawah yang terkenal dengan massa PDI itu sendiri yang berpaling kepada Megawati. Perjuangan yang gigih dalam tubuh PDI mendapat dukungan dari elemen masyarakat pendukungnya yang mana Megawati memperoleh kedudukan sebagai ketua umum PDI Perjuangan yang baru. Kenyataannya terbukti pada masa kepemimpinan Megawati memperoleh suara terbanyak dalam pemilu tahun 1999. awal dari kebangkitan PDI Perjuangan sebagai langkah bagi calon legislatif PDI Perjuangan di Yogyakarta dan diseluruh Indonesia, karena calon legislatif maupun kader yang disiapkan dalam pemilu selalu mengingat masa lalu yang suram dan melakukan perubahan untuk berbenah diri dalam tubuh PDI Perjuangan serta menentang sifat otoriter yang terjadi pada masa Orde Baru sehingga timbul

Dengan melihat gambaran di atas maka alasan penulis mengangkat tema calon legislatif dari studi kasus dalam intern partai PDI Perjuangan di sebabkan oleh beberapa alasan antara lain :

1. PDI Perjuangan merupakan salah satu partai peserta pemilihan umum (pemilu) yang bangkit dari keterpurukan pada masa orde baru, terbukti dengan Megawati Soekarnoputri sebagai ketua umum DPP PDI Perjuangan adalah salah satu tokoh reformasi tersebut. karena itulah penulis sangat ingin tahu seberapa signifikankah peran partai untuk mengekspos kualitas caleg di tataran publik mengingat PDI Perjuangan adalah partai nasionalis dengan adanya *political will*. Keseriusan partai akan hal ini merupakan faktor mutlak dan akan menjadi fokus dari penelitian yang digunakan penulis.
2. Sejauh mana keinginan caleg PDI Perjuangan dalam menjalankan 2 agenda besar bangsa sebagai kebijakan partai.
3. PDI Perjuangan memperoleh suara terbesar di Daerah Istimewa Yogyakarta⁶.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang dirumuskan di dalam latar belakang masalah di atas, maka perumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana mekanisme rekrutmen calon anggota legislatif Partai Demokrasi Indonesia (PDI Perjuangan) pada pemilu legislatif 2004 di propinsi D. I. Yogyakarta?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi terpilihnya seseorang menjadi calon legislatif PDI Perjuangan DIY, pada pemilu 2004?

⁶ www.kpu.go.id, Rabu 5 Mei 2004

C. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori dimaksudkan adalah teori-teori yang digunakan di dalam melakukan penelitian sehingga penelitian ini menjadi jelas, sistematis dan ilmiah.

Sedangkan landasan pemikiran yang digunakan sebagai kerangka dasar atas pijakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Partai Politik

a. Pengertian Partai Politik

Dalam setiap negara demokratis terdapatnya partai politik yang lebih dari satu termasuk sebagaimana yang telah dialami Indonesia sebagai negara yang sedang berkembang merupakan syarat yang paling menonjol. Mengingat rakyat memiliki beberapa alternatif untuk memilih. Tanpa adanya pilihan alternatif, maka rakyat akan sukar untuk menyalurkan aspirasi-aspirasinya, tentu saja yang paling cocok bagi dirinya. Oleh karena itu, adanya wadah penyaluran pemikiran yang berbeda-beda merupakan suatu kondisi yang mau tidak mau harus ada. tanpa adanya partai politik yang lebih dari satu maka demokrasi tidak dapat ditegakkan.⁷

Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir anggotanya mempunyai orientasi nilai-nilai yang sama kelompok ini berusaha memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan mereka.⁸

⁷ Cheppy Haricahyono, *Ilmu Politik dan Perspektifnya*, Yogyakarta :Tiara Wacana, 1986, hal. 216.

Ada beberapa defenisi tentang partai politik yang akan diuraikan di bawah ini :

1) **Mark M. Hagopian**

Partai politik adalah suatu organisasi yang dibentuk untuk mempengaruhi bentuk dan karakter kebijakan publik dalam rangkaian prinsip kepentingan ideologis melalui praktek kekuasaan secara langsung partisipasi rakyat.⁹

2) **Carl J. Friedrick**

Partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan penguasaan ini memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal maupun material.

3) **R.H. Soltau**

Partai politik adalah sekelompok warga negara yang sedikit banyak terorganisir yang bertindak sebagai suatu kesatuan politik dan yang dengan memanfaatkan kekuasaannya untuk memilih dengan tujuan menguasai pemerintahan dan melaksanakan kebijakan umum mereka.

4) **Burke**

Partai politik adalah kumpulan orang-orang yang mempromosikan usaha-usaha mereka mereka bersama-sama diletakkan atas sejumlah

prinsip-prinsip khususnya yang disetujui kesepakatan tersebut bisa sebagai ideologis garis besar perjuangan program dan lain-lain.

Pendapat-pendapat tersebut diatas pada intinya partai politik adalah merupakan persekutuan dari individu-individu yang diorganisasikan untuk memilih, mempengaruhi, dan mengontrol jabatan-jabatan politik. Jadi disamping partai politik juga mempunyai tujuan untuk mendapat dan mempertahankan kekuasaan guna mengendalikan roda pemerintahan serta merealisasikan program-program partai, partai politik juga dituntut untuk dapat mempengaruhi dan mengontrol kebijakan-kebijakan yang sekiranya tidak berpihak kepada masyarakat, karena pada dasarnya dukungan suara rakyat lebih diperlukan untuk kesuksesan sebuah partai politik.

Dari beberapa pengertian partai politik di atas mungkin dapat diambil garis besarnya partai politik, partai politik pada hakekatnya merupakan suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok orang yang mempunyai cita-cita, tujuan-tujuan, dan orientasi yang sama, dimana organisasi ini berusaha untuk memperoleh dukungan dari rakyat dalam rangka usahanya untuk mempertahankan atau memperoleh kekuasaan dan kemudian mengendalikan atau mengontrol jalannya roda pemerintahan, yang semuanya itu pada gilirannya sebagai pangkal tolak organisasi tersebut dalam usahanya merealisasikan atau melaksanakan program-programnya yang telah ditetapkan.

Jelas sudah bahwa eksistensi serta kekuasaan yang didapat oleh sebuah partai politik itu tidak lepas dari dukungan masyarakat, oleh karena

kepada rakyat bukan berpihak kepada partai yang *note bene* untuk kepentingan golongan ataupun individu. Hal ini bukan hal yang tabu bagi bangsa Indonesia ketika masa kampanye partai menjelang pemilu, untuk memperoleh suara terbanyak dari masyarakat, partai menyerukan program yang seakan berpihak pada rakyat kecil. Namun kekuasaan itu tercapai tidak jarang sebuah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah pada era tersebut tidak berpihak pada rakyat kecil, bahkan menyengsarakan rakyat kecil, atau ia hanya mementingkan kepentingan partainya saja serta mementingkan kepentingan individu demi kantong pribadi.

b. Fungsi-fungsi Partai Politik

Partai politik adalah sebuah organisasi modern masyarakat yang terorganisir, sebagaimana dijelaskan pada pengertian partai politik diatas, kiranya partai politik mempunyai peran dan fungsi dalam masyarakat itu sendiri. Adapun fungsi partai politik menurut Prof. Miriam Budiardjo ialah:

1) Partai sebagai sarana komunikasi politik.

Salah satu tugas penting partai politik adalah menyalurkan beberapa ide dan pendapat serta aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga kesimpangsiuran ide dan pendapat tadi di dalam masyarakat berkurang. Pendapat dan ide yang berbeda di masyarakat diakomodasi oleh elit partai yang kemudian akan disalurkan kembali kemasyarakat dalam bentuk kebijakan yang berpihak pada masyarakat, dan tentu saja berdasar atas kepentingan bersama. Memang

... dan sebelum ide dan pendapat terkompilasi ke masyarakat elit

partai terlebih dahulu merumuskan dan menetapkannya ke dalam program partai untuk kemudian diteruskan ke pemerintah.

Selain itu partai politik juga berfungsi untuk memperbincangkan dan menyebarkan rencana-rencana dan kebijaksanaan-kebijaksanaan pemerintah. Dengan demikian terjadi arus informasi *up to down* atau sebaliknya yang mana peran dari partai politik berupa penghubung antara yang memerintah dengan yang diperintah, dan antara pemerintah dan warga negara dalam menjalankan fungsi-fungsi ini partai politik sering disebut *broker* (perantara) di dalam suatu bursa-bursa ide. Bahkan kadang-kadang juga dikatakan bahwa partai politik adalah sebagai alat pendengar bagi pemerintah yang bertindak, sedang warga negara sebagai pengeras suara.

2) Partai politik sebagai sarana sosialisasi politik

Peranan lain dari partai politik adalah sarana sosialisasi politik (*instrumen of political socialization*). Di dalam ilmu politik sosialisasi politik diartikan sebagai proses yang dilalui seseorang dalam memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang umumnya berlaku di masyarakat di manapun ia berada. Biasanya sosialisasi ini berjalan secara berangsur-angsur dari masa kanak-kanak hingga mencapai dewasa. Sosialisasi politik juga mencakup proses melalui arah mana masyarakat menyampaikan norma-norma dan nilai-nilai dari satu generasi ke generasi berikutnya. Dalam rangka

... dan partai politik juga berusaha optimal untuk memperoleh

dukungan yang seluas-luasnya dari masyarakat. dan untuk mencapai tujuan ini, maka partai berupaya menciptakan *image* yang baik di mata masyarakat bahwa sanya elit-elit partai di dalam partai-partai yang bersangkutan memperjuangkan kepentingan umum. Selain berupaya menanamkan solidaritas di dalam tubuh partai, partai politik juga mendidik anggota-anggotanya menjadi manusia yang sadar akan tanggung jawabnya sebagai warga negara dan menempatkan kepentingan sendiri di bawah kepentingan nasional. Adapun proses sosialisasi politik dapat dilakukan melalui ceramah-ceramah penerangan, kursus kader, kursus penataran dan lain-lain.

3) Partai politik sebagai sarana rekrutmen politik

Fungsi partai politik juga untuk mencari dan mengajak orang-orang yang berbakat untuk turun aktif dalam kegiatan politik sebagai anggota partai. Akibatnya partai dapat memperluas partisipasi politik masyarakat. Caranya dapat melalui kontak pribadi, persuasi dan lain-lain. Juga diusahakan agar dapat merekrut kaum muda untuk dididik menjadi kader di masa yang akan datang diharapkan dapat menggantikan posisi elit lama (*selection of kadership*). Dengan melaksanakan fungsinya sebagai sarana rekrutmen politik, partai politik yang bersangkutan pada dasarnya tidak perlu khawatir akan nasib masa depan kepemimpinan bangsa sebab secara tidak langsung partai-partai politik telah dapat memenuhi kebutuhannya, dengan adanya keterlibatan dari individu-individu yang berbakat dan berpotensi untuk dapat

partai adalah negara yang masyarakatnya majemuk. Kemajemukan masyarakat dapat ditunjukkan dengan terdapatnya bermacam-macam perbedaan sosial antara lain: ras, suku, agama, dan status. Negara-negara yang menganut sistem ini adalah : Kanada, Nederland, Skandinavia dan lain-lain.

3) Sistem Satu Partai

Sistem satu partai menunjukkan kepada kita bahwa di suatu negara hanya terdapat satu partai politik yang dominan, dalam arti partai politik tersebut memainkan peranan yang dominan dalam kehidupan politik di negara dimana dia berada. Partai politik yang ada di negara yang menganut sistem satu partai mungkin benar-benar merupakan satu-satunya partai politik yang ada di negara tersebut, tetapi mungkin pula di samping partai politik tersebut di negara itu masih terdapat beberapa partai politik yang tidak mempunyai peranan penting dalam kehidupan politik. Pada umumnya negara-negara yang menganut sistem ini adalah negara-negara yang baru merdeka.

2. Rekrutmen Politik

a. Pengertian Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik pada esensinya adalah penyeleksian individu-individu yang berbakat untuk dapat menduduki jabatan politik atau jabatan pemerintahan¹²

Menurut Jack C. Plano rekrutmen politik adalah pemilihan orang-orang untuk mengisi peranan dalam sistem sosial. Perekrutan politik ditandai dengan terisinya posisi formal dan legal seperti Presiden, pembuat undang-undang, begitu juga peranan yang kurang formal misalnya pembujuk, aktivis partai ataupun propagandis.¹³

Adapun definisi rekrutmen politik yang dipaparkan oleh Ramlan Subakti adalah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan sistem pemerintahan pada khususnya.¹⁴ maka dengan demikian rekrutmen politik sangat berhubungan terhadap karier seseorang.

Adapun cara yang di tempuh dalam rekrutmen politik antara lain: kontak-kontak pribadi, persuasi, dan juga dapat diusahakan dengan cara menarik golongan muda untuk di didik menjadi kader dengan harapan di masa yang akan datang dapat menduduki jabatan politik ataupun jabatan pemerintahan. Fungsi rekrutmen politik ini semakin besar porsinya manakala partai politik adalah partai tunggal seperti halnya di dalam sistem politik totaliter atau manakala partai tersebut merupakan partai mayoritas dalam badan perwakilan rakyat sehingga berwenang membentuk pemerintahan dalam sistem politik demokratis. Selain itu fungsi rekrutmen politik sangatlah penting terhadap kelangsungan sistem politik sebab tanpa

¹³ Jack C. Plano, *Kamus Analisa Politik*, Jakarta; Rajawali, 1985, hal. 211.

¹⁴ Ramlan Subakti, *Rekrutmen Politik*, Jakarta; Gramedia, 1988.

elit yang mampu melaksanakan peran dan tanggung jawabnya, maka kelangsungan sistem politik akan terancam.¹⁵

Biasanya prosedur perekrutan yang dilaksanakan dan diterapkan oleh masing-masing partai berbeda-beda antara satu dengan yang lainnya, tetapi terdapat suatu kecenderungan bahwa individu-individu yang berbakat yang dicalonkan untuk menduduki jabatan politik maupun jabatan pemerintahan mempunyai latar belakang yang hampir sama, yaitu bahwa mereka berasal dari kelas menengah atau kelas atas dan walaupun mereka berasal dari kelas bawah maka mereka merupakan orang-orang yang telah memperoleh pendidikan yang memadai.¹⁶ Hal yang seperti ini disebabkan karena adanya tuntutan teknologi dan zaman yang semakin maju dan modern, maka jabatan politik dan jabatan pemerintahan sangat membutuhkan orang-orang yang memiliki pengetahuan dan kecakapan yang relatif sulit didapatkan di luar pendidikan dan latihan.¹⁷ Pada umumnya, pelaksanaan rekrutmen politik dapat dibedakan menjadi dua tahap:

1) Perekrutan Terbuka

Rekrutmen itu terbuka untuk seluruh masyarakat tanpa kecuali mempunyai kesempatan yang sama untuk direkrut apabila yang bersangkutan telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Setiap masyarakat yang bakat dan keahlian, mempunyai kesempatan yang sama

2) Perekrutan Tertutup

Individu-individu tertentu saja yang dapat direkrut untuk menduduki jabatan politik ataupun pemerintahan. Dalam rekrutmen tertutup ini, kesempatan tidak terbuka untuk semua masyarakat. Perekrutan hanya dilakukan untuk kalangan tertentu saja, misalnya perekrutan karena keturunan, keluarga, persamaan darah, dengan penguasa. Jadi dalam rekrutmen tertutup ini kesempatan untuk menduduki jabatan politik ataupun pemerintahan sangatlah kecil.

b. Proses Rekrutmen Politik

Dalam rangka untuk meningkatkan representasi caleg sehingga dapat terpilih dalam parlemen yang penulis fokuskan pada parlemen daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, harus melewati rintangan krusial antara lain :

1) Menyeleksi diri sendiri

Tahapan ini merupakan dasar bagi caleg untuk memutuskan bahwa caleg ingin mencalonkan diri untuk jabatan publik (politik). Keputusan ini dapat dilandasi atas dua faktor antara lain : ambisi pribadi dan kesempatan untuk mencalonkan diri. Terkadang bagi caleg mempunyai kesiapan diri untuk mencapai target tetapi tidak mudah, namun ini langkah yang penting untuk memperoleh representasi politik.

2) Melakukan seleksi oleh partai.

Tahapan selanjutnya adalah melakukan seleksi oleh partai. Proses seleksi calon legislatif adalah salah satu proses yang dimainkan

oleh partai-partai politik. Prosedur nominasi bervariasi antar negara dan dapat dibedakan oleh sejumlah gambaran yang meliputi nafas partisipasi dan setralisasi atau desentralisasi dari proses rekrutmen politik. Memberi kesempatan besar bagi rakyat untuk berpartisipasi aktif.

3) Melakukan pemilihan

Hambatan yang terakhir adalah seorang anggota parlemen termasuk parlemen daerah, keberadaannya ditentukan oleh pemilih. Adapun mekanisme pemilihan dalam demokrasi yang telah mapan menyarankan agar pemilih terutama memilih gambar partai daripada kandidat individu mengingat tingginya tingkat perselisihan. Namun, kekhawatiran terjadinya perselisihan tersebut alhamdulillah tidaklah terjadi dalam pemilihan umum yang dilakukan oleh bangsa Indonesia baik pemilihan legislatif maupun pemilihan Presiden yang telah terlaksana dua putaran.

3. Pemilihan Umum (Pemilu)

a. Pengertian Pemilu

Suryountoro mengemukakan pengertian pemilu sebagai berikut:

Pemilu adalah suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih untuk memilih wakil-wakilnya yang duduk dalam badan perwakilan rakyat, yakni Dewan perwakilan rakyat (DPR), Dewan perwakilan rakyat daerah propinsi (DPRD Propinsi), dan dewan perwakilan rakyat kabupaten/kota (DPRD kabupaten/kota).¹⁸

¹⁸ *Suryountoro*, *Dasar-Dasar Hukum Pemilu*, Surabaya 1976, hal 2

Hal senada juga dikemukakan oleh *Ali Moertopo*, pengertian dari pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya sesuai dengan asas yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945. pemilu itu sendiri pada dasarnya adalah suatu lembaga demokrasi yang memilih anggota-anggota perwakilan rakyat dalam MPR, DPR, dan DPRD yang pada gilirannya bertugas untuk bersama-sama dengan pemerintah menetapkan politik dan jalannya pemerintahan negara.¹⁹

Mengenai pemilihan menurut *Hariss G. Warren* dan kawan-kawan, pemilu adalah merupakan kesempatan bagi warga negara untuk memilih pejabat-pejabat pemerintah dan menentukan apa yang mereka inginkan untuk dikerjakan oleh pemerintah ketika mereka membuat suatu keputusan.²⁰

Ada beberapa indikator untuk mengukur partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, yaitu:

- 1) Kesiediaan untuk didaftar atau mendaftarkan diri sebagai pemilih.
- 2) Kesiediaan untuk dicalonkan atau mencalonkan diri sebagai anggota dewan.
- 3) Kesiediaan untuk mengikuti dan menghadiri kampanye.
- 4) Kesiediaan untuk mengikuti penghitungan suara.
- 5) Kesiediaan untuk mengikuti pengumuman hasil penghitungan suara, dan

¹⁹ *Ali Moertopo, Strategi Politik Nasional*, Jakarta, CSIS, 1974, hal 61.

²⁰ *Hariss G. Warren, Demokrasi dan Pembangunan*, Jakarta, 1984, hal 104.

- 6) Keterlibatannya dalam partai politik baik langsung maupun tidak langsung.

Dapat dikatakan bahwa pemilihan umum merupakan suatu sarana pemilihan yang dilaksanakan oleh warga negara untuk menentukan atau memilih wakil-wakil (*eksekutif* dan *legislatif*) mereka yang menduduki jabatan di pemerintahan dan sekaligus merupakan kesempatan bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi atau keinginan-keinginannya kepada pemerintah.

b. Sistem Pemilu di Indonesia

Konsep yang berkaitan dengan badan perwakilan rakyat ialah sistem pemilihan. Hal ini disebabkan salah satu fungsi pemilu adalah mengatur prosedur seseorang untuk dipilih menjadi anggota badan perwakilan rakyat atau menjadi kepala pemerintahan. Dengan demikian mempelajari sistem pemilu dalam ruang lingkup yang luas, maka akan ditemui suatu sistem pemilu yang banyak ragamnya, seperti pemilihan suara terbanyak, sistem pemilihan bertingkat dan mungkin masih banyak lagi system pemilu yang lainnya. Namun halnya didalam pembahasan pada penelitian ini, hanya mengacu pada sistem pemilu yang diterapkan di Indonesia.

Sistem pemilihan Mekanis dan sistem pemilihan Organik.

1) Sistem pemilihan mekanis

Pengertian di dalam sistem pemilihan mekanis, apabila seseorang yang duduk di lembaga perwakilan melalui pemilu, maka sifat

Secara umum perwakilan semacam ini mempunyai kelemahan karena yang terpilih biasanya adalah orang yang populer, karena reputasi politiknya, tetapi belum tentu menguasai bidang-bidang teknis pemerintahan, perekonomian dan sebagainya.

Dalam sistem mekanis, partai-partai mengorganisasikan para pemilih, dan disinilah partai politik atau organisasi politik berkembang baik menurut sistem satu partai, dua partai atau banyak partai seperti yang dianut liberalisme, sosialisme maupun komunisme. Bedanya, negara-negara liberalisme mengutamakan individu-individu sebagai kesatuan otonom dan memandang masyarakat sebagai suatu kompleks hubungan-hubungan antar individu yang bersifat kontraktual, sedangkan sosialisme terutama mengutamakan totalis kolektif masyarakat, dan mengecilkan peran individu-individu dalam totalis kolektif ini.

Sistem pemilihan mekanis biasanya dilaksanakan dengan dua sistem pemilu umumnya sistem pemilihan umum yang berlaku dan sering di gunakan terdiri atas 2 macam antara lain :²¹

a) Sistem distrik (*single member constituency*).

Sistem distrik (dalam terminologi politik sering disebut *plural majority*) adalah wilayah negara/pemerintahan yang dibagi menjadi distrik pemilihan yang masing-masing diwakili oleh satu wakil dan yang terpilih yang memperoleh suara yang mayoritas.

Kelebihan sistem distrik adalah sebagai berikut:

- (1) Menghasilkan kondisi *clear cut choice*, suatu keadaan di mana pemilih, akan dengan sangat mudah memilih partai politik yang ikut dalam pemilu, karena ada perbedaan yang sangat tajam sehingga pilihan menjadi sangat jelas. Pemilih di dorong untuk memilih salah satu di antara dua pilihan.
- (2) Memudahkan terbentuknya satu sistem pemerintahan yang terdiri dari satu partai yang menghasilkan satu kondisi mayoritas. Sistem distrik akan mengakibatkan partai mayoritas mendapat bonus kursi karena kondisi *over representation* yang terjadi dalam situasi di mana jumlah suara yang diperoleh secara nasional di menangkan oleh partai kurang dari jumlah kursi yang diperolehnya di parlemen. Sedangkan *under representation* biasanya di alami oleh partai kecil di mana jumlah suara yang diperoleh secara nasional yang dimenangkan oleh partai lebih dari jumlah kursi yang di peroleh dalam pemilu di parlemen.
- (3) Meningkatkan koherensi (oposisi) dalam parlemen. Partai oposisi lebih bermakna di sistem distrik dibandingkan dengan sistem proporsional. Kedudukan yang sama dengan partai pemerintah dan memperoleh kursi yang sama di parlemen untuk dapat mengontrol pemerintah mendorong fusi partai secara alamiah bukan oleh regulasi dari pemerintah.
- (4) Partai-partai di dorong untuk menghasilkan sebuah integrasi yang

berbagai elemen masyarakat biasanya menjadi basis partai politik bukan pada isu-isu fragmentasi sosial (*primordialisme*). Dorongan terhadap partai terjadi akibat ada kecenderungan membuat dua partai besar tersebut bersifat terbuka.

- (5) Menghasilkan suatu pemerintahan yang lebih stabil di banding dengan proporsional apalagi jika dipadu dengan sistem pemilihan Presiden secara langsung.
- (6) Akan mengeluarkan partai-partai *ekstreem* (cenderung berdasarkan ideologi) dari parlemen kecuali partai-partai minoritas *ekstreem* tersebut terkonsentrasi dalam satu wilayah.
- (7) Hubungan antara konstituen dengan anggota parlemen menjadi sangat kuat karena satu anggota konstituen mewakili satu wilayah geografis yang sangat jelas.
- (8) Memungkinkan pemilih memilih orang-orang populer di wilayahnya bukan partai politik.
- (9) Memungkinkan calon non partai bisa memenangkan pemilu.

Sedangkan kelemahan sistem distrik adalah sebagai berikut:

- (1) Mengabaikan partai-partai minoritas dari representasi yang adil.
- (2) Cenderung mengecualikan kelompok minoritas (tidak mempunyai kesempatan representasi politik di parlemen).
- (3) Mempersulit perwakilan kaum perempuan di parlemen dikarenakan dominasi kandidat kaum laki-laki sehingga terdapat sindrom di masyarakat.

- (4) Mendorong munculnya perkembangan partai politik berdasarkan klien, etnis dan wilayah yang menyebabkan terjadinya perpecahan yang tajam di masyarakat, kondisi geografis yang mempertajam adanya separatis.
 - (5) Anggota parlemen lebih terkonsentrasi perhatiannya pada kepentingan daerah pemilihan bukan kepentingan nasional.
 - (6) Akan menghasilkan sisa suara (*wasted votes*) yang sangat besar karena sisa suara yang diperoleh oleh satu partai di satu wilayah tidak mungkin dilimpahkan ke daerah lain sehingga sistem distrik mempunyai kecenderungan bahwa pemilu tidak bermakna.
 - (7) Cenderung tidak responsif terhadap perubahan opini publik jadi pola-pola konsentrasi dukungan terhadap sebuah partai mengakibatkan suatu partai dapat secara eksklusif mengendalikan pemerintahan sehingga ia tidak dapat memerlukan koalisi, namun tidak dapat di ubah hingga pemilu berikutnya.
 - (8) Sangat terbuka dengan manipulasi batas-batas *electoral* (pemilu) yang sangat tidak fair yang biasanya di sebut dengan istilah *Gerry Mandering*, artinya membagi wilayah menjadi kantong-kantong konsentrasi yang sangat menguntungkan partai.
- b) Sistem Proporsional (Sistem perwakilan berimbang/*member multy Constituency*)

Sistem proporsional adalah sistem pemilu dimana kursi yang

terdapat di parlemen dapat untuk didistribusikan dalam suatu pemilu

dibagikan kepada partai-partai atau golongan politik yang turut dalam pemilihan sesuai dengan sumbangan suara yang di perolehnya dalam pemilihan yang bersangkutan. dalam sistem ini mempunyai keuntungan yang besar yaitu bersifat representatif dalam arti bahwa setiap suara turut diperhitungkan dan praktis tidak ada suara yang hilang.

Kelebihan dari sistem proporsional adalah sebagai berikut:

- (1) Cenderung menghasilkan perwakilan politik yang beragam di mana kelompok minoritas akan mendapatkan keuntungan mempunyai wakil dalam pemilu.
- (2) Perwakilan perempuan lebih mudah di peroleh dan lebih mudah untuk di tingkatkan karena adanya *political mind*.
- (3) Terbentuknya sistem pemerintahan yang efisien dan memungkinkan terjadinya *power sharing* di antara partai politik karena sangat sulit menghasilkan mayoritas pemerintahan tunggal.
- (4) Memfasilitasi perwakilan dari partai-partai minoritas untuk bisa masuk dalam parlemen.
- (5) Mendorong partai-partai menampilkan daftar kandidat yang bersifat inklusif dan mempunyai diversifikasi sosial yang tinggi.
- (6) Membuat kelompok-kelompok minoritas mungkin mempunyai

biasanya cenderung mencantumkan tokoh-tokoh minoritas untuk menarik dukungan masyarakat.

(7) Mencegah terjadinya separatisme di daerah karena kelompok minoritas mempunyai kesempatan.

Sedangkan kerugian sistem proporsional adalah sebagai berikut :

(1) Pemerintahan biasanya berbentuk koalisi dan kelemahan dari koalisi adalah ketidakstabilan koalisi sangat tergantung pada koalisi.

(2) Terjadinya fragmentasi partai politik (cenderung terpecah belah) karena setiap fraksi dalam partai politik mungkin dapat kursi di parlemen dengan sangat mudah jika ia membentuk partai baru.

(3) Sistem proporsional menghasilkan perwakilan yang lemah, di mana hubungan wakil rakyat dengan pemilih lemah, sangat mungkin rakyat tidak mengenal wakil yang di pilih, karena yang di pilih adalah partai (peranan partai lebih dominan).

(4) Mengakibatkan sistem perhitungan suara rumit sehingga biaya penyelenggaraan jauh lebih mahal.

(5) Fusi partai politik harus di lakukan dengan pemaksaan dari *electoral treshold* (jumlah suara minimal yang harus di peroleh oleh suatu partai dalam pemilu untuk bisa ikut dalam pemilu

2) Sistem Pemilihan Organisme

Sistem ini memandang rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup bersama-sama dalam beraneka ragam persekutuan hidup yang meliputi :

- a) Persekutuan hidup geologis (berdasarkan keturunan) rumah tangga.
- b) Persekutuan hidup territorial (berdasarkan tempat tinggal) desa, kota, daerah.
- c) Persekutuan hidup fungsional spesial, cabang industri.
- d) Lapisan-lapisan sosial : buruh, tani, nelayan, pedagang, majikan.
- e) Lembaga-lembaga sosial: universitas, institut, sekolah tinggi dan akademi.

Dari kelima keanekaragaman persekutuan hidup dapat dijelaskan bahwa, rakyat sebagai sejumlah individu-individu yang hidup secara bersamaan dalam keanekaragaman warna persekutuan rakyat juga dipandang sebagai suatu organisme atas organ-organ yang memiliki kedudukan dan fungsi tertentu. Persekutuan hidup inilah yang menjadi hak untuk mengutus wakil-wakil kepada badan perwakilan rakyat.

Dalam sistem pemilihan organisme, partai-partai atau organisasi politik tidak perlu dikembangkan, karena pemilihan diselenggarakan dan dipimpin oleh masing-masing persekutuan hidup dalam lingkungan sendiri. Badan perwakilan adalah bersifat badan perwakilan kepentingan-

... ..

Pemilu pada masa orde baru sampai dengan era reformasi pemilihan dilakukan dengan sistem proporsional tertutup. Dimana kursi yang tersedia diparlemen pusat diperebutkan dan di bagi kepada partai-partai atau golongan politik yang turut dalam pemilihan tersebut sesuai dengan perolehan suara yang di peroleh. Dalam pemilihan yang dilakukan pada masa itu, kita tidak mengetahui siapa yang akan menjadi wakil terpilih yang menduduki jabatan. Dan pada pemilu tahun 2004 digunakan sistem proporsional terbuka, pada dasarnya sama dengan sistem pemilu yang sebelumnya. yang membedakan antara sistem proporsional tertutup dan terbuka pada dasarnya yaitu para wakil dari partai politik atau golongan politik yang mengikuti pemilu dipilih secara langsung siapa yang menjadi wakil dari partai politik atau golongan tersebut. Demikian juga dengan pemilihan Presiden dan wakil Presiden di lakukan secara langsung oleh rakyat.²²

Tahap-tahap pemilu legislatif di Indonesia:

a) Pendaftaran pemilih

Kegiatan pendaftaran pemilih merupakan kegiatan yang pertama kali di selenggarakan dalam tahap pemungutan suara. Atau dengan perkataan lain dapat pula pemilu menyatakan bahwa kegiatan pendaftaran pemilih merupakan kegiatan yang paling awal dari penyelenggaraan pemilu sebagai suatu kegiatan yang bulat.

²² Murni, *Demokrasi Transformatif*. JPE Press, Yogyakarta, 2004, hal 30

Kegiatan pendaftaran pemilih adalah kegiatan dimana warga negara yang telah memenuhi persyaratan yang telah di tentukan untuk didaftar sebagai orang yang mempunyai hak untuk memberikan suaranya memilih pada saat tahap pemungutan suara berlangsung. Dengan sendirinya tidak diperkecilkan memberikan suaranya atau memilih pada saat tahap pemungutan suara berlangsung.

Pada umumnya persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi seseorang dapat terdaftar atau tercatat sebagai orang yang mempunyai hak untuk memberikan suara atau hak memilih dalam pemilu, antara lain meliputi status kewarganegaraan, umur yang bersangkutan, pendidikan, tidak terganggu jiwa atau ingatannya, tidak kehilangan hak pilihnya karena sebab tertentu.

b) Kegiatan pencalonan

Kegiatan pencalonan merupakan salah satu kegiatan dalam tahap sebelum pemungutan suara. Pencalonan atau nominasi merupakan kegiatan yang harus diselenggarakan dalam suatu pemilu. Tidak terlebih apabila dinyatakan tanpa terselenggaranya kegiatan pencalonan atau nominasi, maka tidak mungkin dapat diselenggarakan pemilu.

Kegiatan pencalonan adalah suatu proses dimana warga negara yang telah memenuhi suatu proses dimana warga negara yang

orang yang dicalonkan dalam pemilu sebagai wakil rakyat untuk menduduki suatu jabatan publik.

c) Kegiatan kampanye

Kampanye merupakan kegiatan yang dilakukan oleh para kontestan pemilu (dalam hal ini partai-partai yang ambil bagian dalam pemilu) untuk menarik sebanyak-banyaknya pendukung, dimana pada gilirannya pendukung ini akan memberikan suaranya kepada partai politik yang menarik tadi. Setiap partai yang terlibat dalam pertarungan untuk memperoleh jumlah suara terbanyak mungkin dapat di pastikan tidak akan melewatkan kesempatan untuk ikut bagian dalam kampanye.

Kampanye dalam rangka pemilu merupakan kesempatan bagi para kontestan guna menanamkan pengaruh dan simpati di masyarakat dengan kalangan menjelaskan program-program perjuangan politiknya bagi kepentingan bangsa dan negara, sehingga dengan cara demikian masing-masing kontestan berusaha untuk meraih suara sebanyak-banyaknya pada saat pemungutan suara.²³

Berdasarkan UU No. 12 Tahun 2003, tentang pemilu tahun 2004, kampanye dilakukan melalui :

(1) Pertemuan terbatas

(2) Tatap muka

- (3) Penyebaran melalui media cetak dan media elektronik
- (4) Penyiaran melalui radio dan televisi.
- (5) Penyebaran bahan kampanye kepada umum
- (6) Pemasangan alat peraga di tempat umum
- (7) Rapat umum, dan
- (8) Kegiatan lain yang tidak melanggar peraturan perundang-undangan.

d) Tahap Pemungutan Suara

Tahap sesudah berlangsungnya pemungutan suara adalah merupakan tahap kegiatan yang paling akhir dari serangkaian kegiatan dalam pemilihan umum. Tahap sesudah berlangsungnya pemungutan suara selesai diselenggarakan, langsung dapat diselenggarakan kegiatan pertama dari tahap sesudah setelah berlangsungnya pemungutan suara.

Di dalam ketentuan undang-undang pemilu yang telah diatur dalam pasal 81 dalam UU Republik Indonesia No 12 tahun 2003 tentang pemilu tahun 2004 :

- (1) Pemungutan suara pemilu anggota DPR, DPD, DPRD propinsi, dan DPRD kabupaten/kota.
- (2) Hari, tanggal dan waktu pemungutan suara bagi pemilihan anggota DPR, DPD, DPRD propinsi dan DPRD kabupaten/kota

untuk semua daerah pemilihan di tetapkan oleh KPU

Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa tahap pemungutan suara dapat berhasil dengan baik, jika semua warga negara yang mempunyai hak untuk memberikan suara dan telah didaftar sebagai seorang pemilih, dalam mempergunakan hak suaranya tadi disertai dengan kebebasan dan kerahasiaan menurut kata hati nuraninya.

e) Tahap Penghitungan Suara

perhitungan suara sebagaimana telah diatur dalam UU.No 12 tahun 2003 tentang pemilihan umum 2004 pasal 96 dilakukan segera oleh KPPS/KPPSLN di TPS. Para saksi partai politik peserta pemilu, para pemilih, dan berbagai pihak berhak hadir untuk menyaksikan dan mengikuti jalannya perhitungan suara oleh KPPS/KPPSLN.

Kaitannya dengan hal tersebut, Haryanto mengemukakan pendapatnya bahwa yang dimaksud dengan penghitungan adalah kegiatan dimana dilakukan perhitungan terhadap suara-suara yang masuk pada saat tahap perhitungan suara. Kegiatan penghitungan suara merupakan kegiatan yang pertama dalam tahap sesudah pemungutan suara. Adapun yang dimaksud dengan penghitungan suara adalah kegiatan dimana dilakukan penghitungan terhadap suara-suara yang masuk pada saat pemungutan suara.

f) Penetapan Hasil Pemilu

Penetapan hasil pemilu merupakan kegiatan akhir dari

kegiatan dalam tahap tahap pemilu, sebab setelah

dilakukan penghitungan suara, maka dapat diketahui segera hasil perolehan suara dari masing-masing partai, kemudian hasil perolehan suara ditetapkan, sehingga dapat diketahui pemenang pemilu tersebut.

Sebagaimana dijelaskan oleh Haryanto yang berkaitan dengan hal diatas adalah penetapan hasil pemilu ini berarti pula menunjukkan kontestan yang keluar sebagai pemenang dalam pemilu tersebut. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa pemilu ini merupakan suatu pemilihan yang dilakukan oleh warga negara yang mempunyai hak pilih, untuk memilih wakil-wakil mereka yang duduk di jabatan pemerintahan, dimana di harapkan para wakil yang dipilih dapat menyalurkan aspirasi mereka dan kebutuhan mereka. Adapun pemilu tersebut dimulai dari pendaftaran calon pemilih sampai pada tahap penetapan hasil pemilu.

c. Pemilu dan Kedaulatan Rakyat

Pada hakekatnya pemilihan umum, di negara manapun mempunyai esensi yang sama, dimana rakyat melakukan kegiatan memilih orang atau sekelompok orang untuk menjadi pemimpin yang bertanggung jawab dalam mengemban apa yang di amanahkan oleh masyarakat dari berbagai strata.²⁴ Dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat menyatakan “kemerdekaan bangsa Indonesia di susun dalam undang-undang dasar yang terbentuk dalam susunan Negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat”.

²⁴ Haryanto, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara*, Jakarta, 1997, hal 4

Dalam rangka menjawab kedaulatan rakyat tersebut adalah melalui pemilu yang demokratis. Pemilu dan hasilnya merupakan barometer sekaligus parameter sejauh mana rakyat menterjemahkan kehendaknya lewat pilihannya sesuai dengan sistem pemilu yang dipraktekkan. Melalui pemilu inilah rakyat di berikan kebebasan dalam menentukan pilihannya tanpa ada intervensi dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab.²⁵

Didasari bahwa demokrasi tanpa pemilu bukanlah demokrasi dalam arti yang hakiki. Disadari pula bahwa menyelenggarakan pemilu adalah satu pekerjaan raksasa dengan biaya yang cukup mahal, melelahkan dan rumit. Meski demikian realitas yang berkembang selama proses pemilu berlangsung telah membuktikan bahwa Indonesia sebagai bangsa yang besar bisa menyelenggarakan pemilu secara demokratis seAsia Tenggara. Pemilu adalah wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat dan sekaligus pesta demokrasi yang merupakan hiburan dengan penuh ceria dan juga penuh ketegangan.²⁶

Pada dasarnya pemilu merupakan salah satu cara atau metode di mana rakyat melakukan pilihan politik.

1) Secara teoritik, fungsi pemilu antara lain:

- a) Legitimasi politik yang diperoleh melalui paksaan, kekerasan dan ancaman. Menurut Antonio Gramsci²⁷ legitimasi yang diperoleh melalui cara-cara tersebut merupakan cara yang tidak elegan, tidak bermoral dan tidak akan bertahan lama dan legitimasi terpenting

berdasarkan kesepakatan. Adapun diadakan pemilu dalam suatu

negara antara lain:

(1) Memperbaharui kesepakatan politik.

(2) Proses legitimasi politik bisa di peroleh dari pemilu ketika

pemerintah mampu mendorong /memperbaharui tingkah laku

politik masyarakat sehingga penguasa dapat menundukkan

masyarakat sehingga mendukung program yang ditawarkan oleh

pemerintah sekaligus mengurangi oposisi terhadap pemerintah.

(3)Proses legitimasi politik bisa dicapai melalui paksaan, dimana

legitimasi di peroleh melalui dukungan dari rakyat sehingga

dapat menekan penggunaan kekerasan.

b) Sarana perwalian politik, di maksudkan untuk mengontrol perilaku,

kebijakan dan program yang dihasilkan oleh pemerintah. Hubungan

antara wakil dan yang diwakili tetap terjaga dimana rakyat tidak

dapat mengambil keputusan sendiri. Ada tiga macam tipe perwalian

politik yang dihasilkan pemilu antara lain:

(1) Delegasi adalah para wakil rakyat memperoleh mandat penuh

dari rakyat sehingga terikat aspirasi/kepentingan politik rakyat.

(2) *Trustee* adalah para wakil rakyat yang tidak terikat pada aspirasi

kepentingan rakyat memilih (memiliki independensi dari rakyat

(3) *Policio* adalah wakil rakyat yang memiliki otonomi untuk mengambil tindakan politik dan dalam waktu yang sama harus berkonsultasi dengan masyarakat.

c) Sarana sirkulasi elit

Pemilu berfungsi melakukan pergantian elit-elit politik secara berkala. Pergantian elit tersebut dilakukan dengan bermacam-macam cara di antaranya melalui kekerasan/kudeta dan penyelenggaraan pemilu yang merupakan cara yang paling beradab menurut rakyat.

Sedangkan menurut Kolabinska :

- (1) Bisa diartikan sebagai pergantian elit di dalam tempat yang sama.
- (2) Mungkin terjadi ketika elit merekrut warga non elit untuk masuk dalam lingkungan elit.
- (3) Terjadi ketika elit baru menang menggantikan elit lama.

d) Sarana pendidikan politik, terjadi proses transformasi demokrasi dan sistem elit.

- (1) Massa sifatnya langsung → mengalami, melihat dan merasakan proses politik.
- (2) Bersifat terbuka → keragaman ide politik dimana rakyat bebas untuk memilih.

2) Syarat-syarat pemilihan umum yang demokratis²⁸

- a) Ada pengakuan terhadap hak pilih universal. Semua warga negara, tanpa pengecualian yang bersifat politis dan ideologis, diberi hak untuk memilih dan dipilih dalam pemilu.
- b) Ada keleluasaan untuk membentuk “tempat penampungan” bagi pluralitas aspirasi masyarakat pemilih. Masyarakat memiliki alternatif pilihan saluran aspirasi politik yang leluasa.
- c) Tersedia mekanisme rekrutmen politik bagi calon-calon wakil rakyat yang demokratis. Harus ada mekanisme pemilihan calon wakil rakyat yang tidak *top down* melainkan *bottom up*. Praktek *dropping* calon wakil rakyat yang berjalan di Indonesia selama ini adalah sebuah kekeliruan.
- d) Ada kebebasan bagi pemilih untuk mendiskusikan dan menentukan pilihan. Masyarakat pemilih diberi kebebasan untuk tahu figur-figur yang harus mereka pilih, menimbang seberapa dekat aspirasi politik sang calon legislator tersebut.
- e) Ada komite atau panitia pemilihan yang independen. Karena inilah yang mengindikasikan bahwa pemilu benar-benar sehat.
- e) Ada keleluasaan bagi setiap kontestan untuk berkompetensi secara sehat. Peluang kompetisi di tentukan dengan memulai penggalangan massa, pemassalan ideologi dan program partai.

²⁸ Eman Hermawan, *Politik Membela Yang Benar (Teori, Kritik dan Nalar)*, Yogyakarta : Yayasan Kajian

E. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana caranya mengukur variabel.³⁰

Dengan menggunakan landasan dari definisi di atas maka variabel dari rekrutmen calon legislatif di DPRD DIY diukur dengan indikator sebagai berikut :

1. Proses mekanisme rekrutmen didalam intern PDI Perjuangan terhadap pencalonan legislatif untuk melaksanakan sesuai dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum.
 - a. Rekrutmen bakal calon legislatif
 - b. Klarifikasi dan verifikasi data
 - c. Monitoring bakal calon legislatif
 - d. Evaluasi kerja dan penetapan bakal calon legislatif
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi rekrutmen calon legislatif di DPRD DIY untuk terlibat di dunia publik (politik).

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang utama untuk digunakan dalam penelitian guna mencapai tujuan penelitian, yang dilakukan dengan menggunakan teknik analisa dan untuk memperoleh data tertentu yang dibutuhkan dalam penelitian. Adapun data tersebut diperoleh dengan melakukan penelitian.

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian deskriptif yang dapat diartikan sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki

adalah data yang dikumpulkan itu berupa data studi kasus dan bersifat monografis, mudah diklasifikasikan dan jumlahnya sedikit.

Dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif, maka data yang di dapat di dalam penelitian (lapangan) tidak lagi di analisis dengan menggunakan rumus-rumus (angka-angka) tetapi data yang diperoleh tersebut diinterpretasikan